



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



TRIBUN PONTIANAK/FERRYANTO
GELEDAH - Sejumlah penyidik Kejari Mempawah menggeledah Kantor DPRD Mempawah, Kamis (19/7). Pengeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014.

JAKSA 7 JAM GELEDAH KANTOR DPRD

SEJUMLAH penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah menggeledah Kantor DPRD Mempawah, Kamis (19/7). Pengeledahan berlangsung di bawah pengawasan empat personel Polres Mempawah bersenjata lengkap. Setelah hampir tujuh jam pengeledahan, penyidik mengeluarkan puluhan bundel dokumen dari kantor tersebut.

HAL 12

TRIBUN PONTIANAK/FERRYANTO

GELEDAH - Sejumlah penyidik Kejari Mempawah menggeledah Kantor DPRD Mempawah, Kamis (19/7). Pengeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014.



7 Jam Geledah Kantor DPRD

■ Kasus Perjalanan Dinas Dewan

MEMPAWAH, TRIBUN - Sejumlah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah mengeledah Kantor DPRD Mempawah, Kamis (19/7). Pengeledahan berlangsung di bawah pengawasan empat personel Polres Mempawah bersenjata lengkap.

Pengeledahan ini dipimpin Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mempawah, Hari Wibowo, dengan mengerahkan enam penyidik. Mereka mengenakan rompi hitam bermerah bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi.

Setelah hampir tujuh jam pengeledahan, penyidik mengeluarkan puluhan bundel dokumen dari kantor tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dipindahkan ke mobil operasional Kejari Mempawah yang telah terparkir di halaman kantor DPRD.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mempawah, Dwi Agus Arfianto, mengatakan, pengeledahan ini merupakan kelanjutan penyidikan pada tahun 2017 lalu terkait dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014.

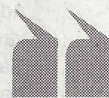
Kegiatan tersebut bersifat rahasia, demi menghindari perbuatan-perbuatan yang

tidak produktif. Misalnya upaya menghalang-halangi penyidik atau penghilangan barang bukti. Pemberitahuan pengeledahan pun baru dilakukan pada hari itu.

"Pihak sekwan tidak ada sama sekali mengetahui akan kedatangan kami, ini dalam rangka memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh auditor," jelasnya.

Kajari memastikan, proses pengeledahan yang dilakukannya sudah sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Pihaknya juga telah mengantongi izin dari pengadilan sejak beberapa hari lalu.

"Pengeledahan ini dalam rangka mempercepat proses auditing dari BPK. Karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap, makanya, kita jemput bola demi efi-



Pihak sekwan tidak ada sama sekali mengetahui akan kedatangan kami, ini dalam rangka memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh auditor

Dwi Agus Arfianto
Kajari Mempawah

siensi waktu dan mempercepat proses penyelidikan," pendapatnya.

Dari pengeledahan itu, pihaknya telah mengamankan 87 item dokumen. "Semua dokumen ini berkaitan dengan data perjalanan dinas DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014," ungkap Dwi Agus.

Pada kasus dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas ini, kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 3,5 miliar. Agus mengungkapkan, pihaknya pun telah mengantongi sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini.

Namun Agus masih enggan mengungkapkan nama dan jumlah tersangka demi menjaga azas praduga tak bersalah. "Kita tidak akan tutupi, tapi harus hormati azas praduga tak bersalah.

Ada saatnya nanti kita harus rilis, kita akan rilis," jelas Dwi.

Kasubag Rapat Sekretariat DPRD Mempawah, Narida, mengatakan kalau saat pengeledahan berlangsung, Sekretaris DPRD Mempawah sedang menghadiri undangan ke Batam hingga Minggu nanti. "Sekwan itu mengikuti Asdesi di Batam, dan baliknya minggu nanti," paparnya.

Ia membenarkan kalau pihak Kejari Mempawah saat pengeledahan itu mengambil berkas-berkas terkait perjalanan dinas anggota DPRD dari tahun 2012 hingga 2014.

"Mereka memerlukan dokumen perjalanan dinas dari 2012 sampai 2014. Jadi saya ikut mengecek apa-apa yang diambil, betul atau tidak yang diambil itu dokumen 2012 sampai 2014," paparnya.

(fer)